

NARASUMBER

**KAJIAN ANALISIS EKSISTENSI LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN SETELAH BERLAKUNYA
UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Dr. Ir. Bambang I. Gunawan, S.Pi., M.Si., IPU

**Disampaikan pada Acara FGD Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
Balikpapan, 9 Nopember 2021**

10 best-ranked economies by income group (rank)

Rank Global Innovation Index 2020

High-income economies (49 in total)

1	Switzerland (1)
2	Sweden (2)
3	United States of America (3)
4	United Kingdom (4)
5	Netherlands (5)
6	Denmark (6)
7	Finland (7)
8	Singapore (8)
9	Germany (9)
10	Republic of Korea (10)

Lower middle-income economies (29 in total)

1	Viet Nam (42)
2	Ukraine (45)
3	India (48)
4	Philippines (50)
5	Mongolia (58)
6	Republic of Moldova (59)
7	Tunisia (65)
8	Morocco (75)
9	Indonesia (85)
10	Kenya (86)

Rank Global Innovation Index 2020

Upper middle-income economies (37 in total)

1	China (14)
2	Malaysia (33)
3	Bulgaria (37)
4	Thailand (44)
5	Romania (46)
6	Russian Federation (47)
7	Montenegro (49)
8	Turkey (51)
9	Mauritius (52)
10	Serbia (53)

Low-income economies (16 in total)

1	United Republic of Tanzania (88)
2	Rwanda (91)
3	Nepal (95)
4	Tajikistan (109)
5	Malawi (111)
6	Uganda (114)
7	Madagascar (115)
8	Burkina Faso (118)
9	Mali (123)
10	Mozambique (124)

Indonesia menduduki peringkat-85 dari 131 negara



KLASIFIKASI NEGARA BERDASARKAN INDEKS PENCAPAIAN TEKNOLOGI, 2015

*Technology
Innovator
Countries*

**Kelas
1**

- ❖ Singapura
- ❖ Korea Selatan
- ❖ Finlandia
- ❖ New Zealand
- ❖ Amerika Serikat

- ❖ Australia
- ❖ Japan
- ❖ Negara-Negara Eropa Barat

*Technology
Implementers
Countries*

**Kelas
2**

- ❖ Malaysia,
- ❖ Argentina
- ❖ Kazakhstan,
- ❖ Thailand
- ❖ Brazil

- ❖ Panama
- ❖ China
- ❖ Chile
- ❖ Negara-Negara Eropa Timur

*Technology
Adaptor
Countries*

**Kelas
3**

Indonesia menduduki peringkat-99 dari 167 negara

*Technologically
Marginalized
Countries*

**Kelas
4**

terdiri atas negara-negara terbelakang di Asia, Afrika dan Pasifik Selatan

Persentase Gross Domestic Spending on R&D (OECD & World Bank data)

NEGARA	% GDP (2019)	TAHUN
Korea	4,640	2019
Jepang	3,199	2019
Jerman	3,190	2019
Amerika	3,067	2019
China	2,235	2019
Singapura	2,64	2020
Malaysia	1,29	2020
Vietnam	0,53	2017
Brunei	0,28	2018
Indonesia	0,31	2020

Problem anggaran riset nasional



OBS 2019 Has Launched
dapatkan hasil lengkap penilaian Indonesia **di sini**

- BERANDA
- BERITA
- KOLOM
- PUSAT DATA
- EVENT / TRAINING
- INDEKS

Beranda / Berita / Nasional / Anggaran Riset Indonesia Terendah di ASEAN

Anggaran Riset Indonesia Terendah di ASEAN



Selasa, 04 Mei 2021, 17:29 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah



Bagikan



POSTUR APBN

APBD
Kabupaten & Kota

Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Anggaran Riset yang Cuma Rp 35 T

NEWS - Lidya Julita S, CNBC Indonesia | 31 July 2019 13:12



Masalah riset & invasi Indonesia (Dimiyati, 2019)



Membangun Peradaban dengan mengubah
"Tempat Jin Buang Anak Menjadi Tempat Jin Buat Anak"

**STRATEGI: PULIHKAN RASA PERCAYA DIRI BAHWA KITA BISA;
REFORM REGULASI SECARA FUNDAMENTAL UNTUK MENGUBAH MINDSET**



Top 10 skills of 2025

Type of skill

- Problem-solving
- Self-management
- Working with people
- Technology use and development

-  Analytical thinking and innovation
-  Active learning and learning strategies
-  Complex problem-solving
-  Critical thinking and analysis
-  Creativity, originality and initiative
-  Leadership and social influence
-  Technology use, monitoring and control
-  Technology design and programming
-  Resilience, stress tolerance and flexibility
-  Reasoning, problem-solving and ideation

COVID-19 is pushing companies



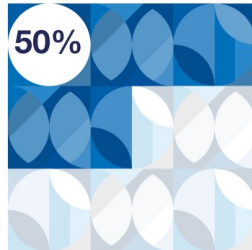
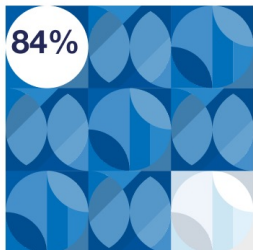
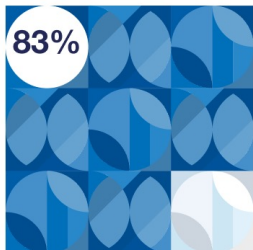
to scale
remote work



to accelerate
digitalization

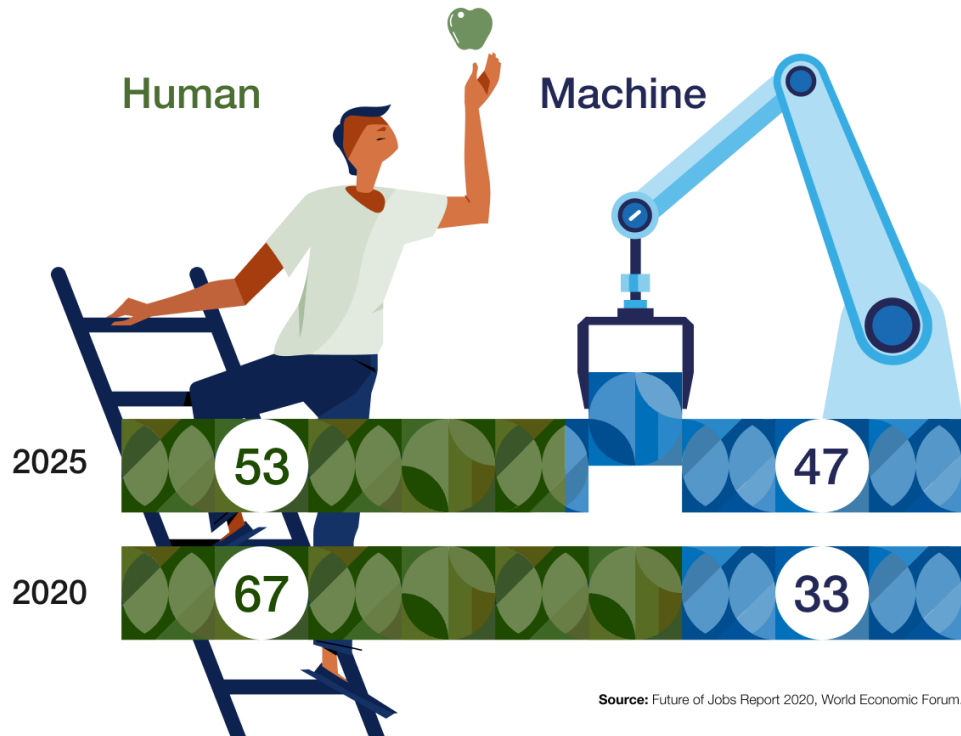


to accelerate
automation



Source: Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum.

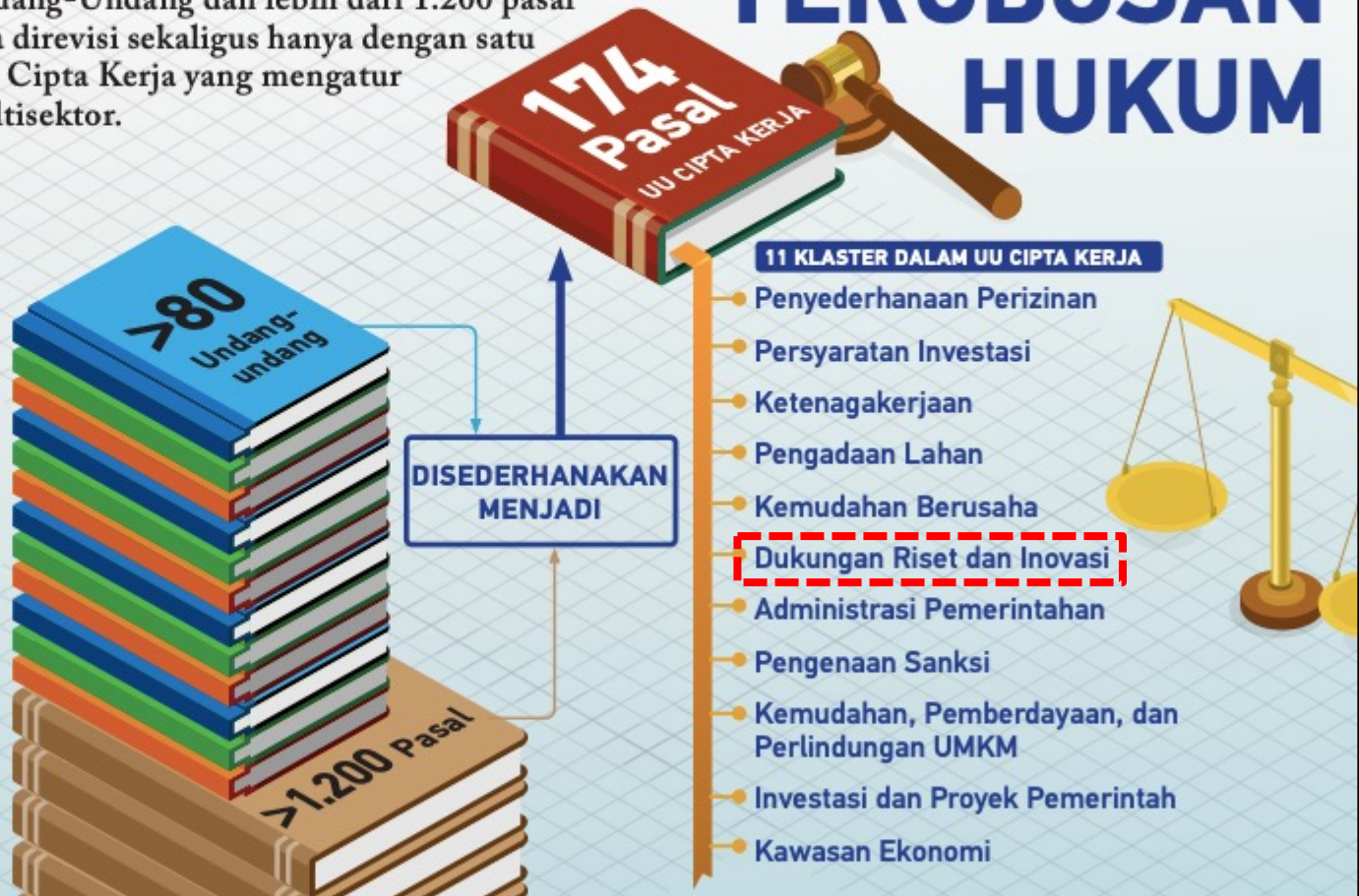
Rate of automation



Source: Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum.

Dengan teknik Omnibus Law, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor.

TEROBOSAN HUKUM



BRIN & BRIDA

- 1> UU 11/2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang Klaster Dukungan Riset dan Inovasi;
- 2> Dasar pembentukan BRIN adalah UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan & Teknologi dan diubah dalam UU No. 11/2020 tentang CK serta diturunkan ke dalam Perpres 78/2021 tentang BRIN;
- 3> Eksistensi BRIDA menurut Perpres 78/2021;



Definisi dan kelembagaan (Perpres 78/2021)

- Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi (Pasal 1)
- Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah (Pasal 1)
- BRIN melakukan pembinaan teknis kepada BRIDA (Pasal 57).
- Pasal 66:
 - (1) BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.
 - (2) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Tugas BRIDA (interpretasi Pasal 67)





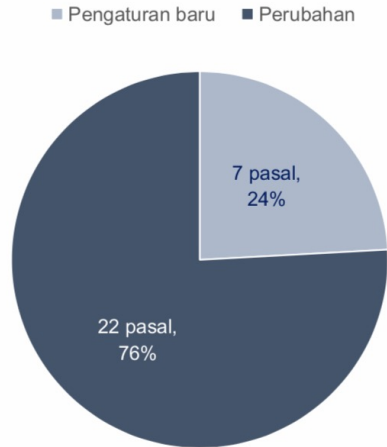
**KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
(Tinjauan khusus terhadap Klaster Dukungan Riset dan Inovasi)**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2021**

Studi terdahulu (CIPG, 2020)

Sekilas Iptek, Riset, dan Inovasi dalam UU Cipta Kerja

- Tersebar dalam 29 pasal dalam 10 bab
- Dari 29 pasal:
 - 7 pasal merupakan pengaturan baru
 - 22 pasal merupakan perubahan terhadap peraturan (UU) yang telah ada → 22 peraturan yang dirujuk.



22 Peraturan yang Dirujuk

1. UU 7/1983 Pajak Penghasilan
2. UU 10/1997 Ketenagakerjaan
3. UU 41/1999 Kehutanan
4. UU 13/2003 Ketenagakerjaan
5. UU 19/2003 Badan Usaha Milik Negara
6. UU 1/2009 Penerbangan
7. UU 4/2009 Pertambangan Mineral dan Batubara
8. UU 13/2010 Hortikultura
9. UU 18/2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan
10. UU 22/2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11. UU 35/2009 Narkotika
12. UU 39/2009 Kawasan Ekonomi Khusus
13. UU 6/2011 Keimigrasian
14. UU 2/2012 Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
15. UU 18/2012 Pangan
16. UU 3/2014 Perindustrian
17. UU 7/2014 Perdagangan
18. UU 23/2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 9/2015 (Perubahan Kedua atas UU 23/2014)
19. UU 39/2014 Perkebunan
20. UU 13/2016 Paten
21. UU 11/2019 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
22. UU 22/2019 Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

6 Isu Iptek, Riset, dan Inovasi dalam UU Cipta Kerja

#1

Posisi dan Kedudukan
Iptek

#2

Peran Aktor

#3

Pendanaan/Insentif

#4

Aktivitas dan Luaran
Litbangjirap

#5

Penambahan Klausul
pada Aturan Turunan

#6

Perubahan Persyaratan
Teknis Menjadi
Persyaratan
Administratif

Tanggapan untuk Metode Penelitian

- 1 >> Bab metode penelitian dapat disajikan metode sampling yang dipilih, tipe responden dan metode pengambilan data (online?) dan skala pengukuran (mis. skala Likert);
- 2 >> Parameter-parameter kelompok persepsi responden yang digunakan dalam daftar pertanyaan perlu dijelaskan;
- 3 >> Framework kajian perlu dibuat yang mencakup relasi antara rumusan masalah, metode penelitian, pendekatan studi dan expected results.



Tanggapan untuk Bab Hasil Kajian

- 1 > Isu-isu strategis penting yang ditemukan peneliti adalah:
(a) kebutuhan SDM peneliti, (b) *development impacts* dari riset/inovasi; (c) peran dari lembaga R&D (Univ/Balitbangda); (d) azas pengembangan riset (kriteria daerah, integratif dan pengembangan SDM
Apakah temuan telah menjawab rumusan masalah
- 2 > penelitian yang ditentukan sebelumnya utamanya terkait kelembagaan Balitbangda (rumusan masalah #2) pasca UU CK dan Perpres 78/2021?
- 3 > Bagaimana kebijakan dan strategi untuk pengembangan iptek, riset dan inovasi dalam sumbangannya untuk pembangunan daerah incl. BRIDA?

Rekomendasi untuk hasil kajian

- 1 > Perlu untuk meningkatkan dampak riset ini terhadap revitalisasi peran lembaga Balitbangda pasca UU Ciptaker dan terbentuknya BRIN dan kebutuhan pembangunan daerah untuk mencapai Visi Berani untuk Kaltim yang Berdaulat (2019-2023);
- 2 > Perlu untuk diidentifikasi kebutuhan aspek perundang-perundang-undangan dalam konteks meningkatkan kontribusi iptek, riset dan inovasi untuk kepentingan daerah termasuk menyosongsong IKN baru;
- 3 > Tindak lanjut (*action plan*) yang diperkirakan dapat meningkatkan peran dan fungsi lembaga riset di daerah perlu untuk disampaikan.



TERIMA KASIH

Bambang I. Gunawan

Anggota TGUP3 Provinsi Kaltim/FPIK Unmul

Email: bambanggunawan1970@gmail.com